

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian Indonesia telah mencapai babak baru setelah berakhirnya era revolusi hijau yang sempat menjadi bukti bagaimana inovasi teknologi meningkatkan produksi bahan pangan. Selama periode 2010-2017 Indonesia berusaha mewujudkan pemenuhan bahan pangan bagi masyarakatnya. Pada 2010, pemerintah mencanangkan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan swasembada beberapa bahan pangan. Tindak lanjut dari pencanangan revitalisasi pertanian adalah Program Swasembada lima komoditas pangan, yaitu beras, daging sapi, kedelai, jagung, dan gula (Ina, 2014).

Namun program tersebut tidak sejalan dengan harapan. Sebagai gambaran pada tahun 2013, Rudy (2013) melaporkan jika Indonesia masih mengimpor kedelai sebanyak 1,8 ton atau 70% dari kebutuhan nasional. Begitu pula dengan komoditas beras, Indonesia mengimpor 1,5 juta ton beras pada tahun 2014 (Sari, 2014). Senada dengan komoditas kedelai dan beras, Indonesia juga masih mengimpor komoditas jagung sebesar 3,25 juta ton pada tahun 2014 (Idris, 2017). Data-data tersebut mencerminkan swasembada pangan belum tercapai.

Pemerintahan baru periode 2014-2019 mencanangkan program serupa pada 2015 dengan nama Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (UPSUS PAJALE). UPSUS PAJALE diterapkan untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai. Program tersebut membuat ketiga komoditas tersebut mengalami peningkatan produksi. Sebesar 75,55 Gabah Kering Giling dihasilkan atau naik 6,64%, produksi jagung naik 8,72% menjadi 20,67 juta ton, sementara kenaikan kedelai mencapai 4,59% dengan jumlah produksi sebesar 43,87 ribu ton (Rizkiyanto dan Hasanah, 2016). Meski demikian Indonesia belum mampu mencapai swasembada pangan dan berkontribusi maksimal pada tingkat makro.

Sektor pertanian perlahan-lahan menunjukkan tendensi kontribusi yang menurun setiap tahunnya di tingkat makro. Hal tersebut dapat diamati dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada periode 2010-2014. Selama periode tersebut, sektor pertanian mengalami penurunan hingga 0,96% terhadap PDB (BPS, 2015a). Meski demikian, sektor pertanian tetaplah penting bagi pembangunan

perekonomian di Indonesia. Apalagi sektor pertanian mempunyai kaitan erat dengan sektor lain terutama sektor industri. Kuncoro (2009) mengatakan strategi pembangunan yang mengutamakan peningkatan produksi melalui industri yang umumnya di kota hanya berjalan baik jika sektor industri dan sektor pertanian menjalin hubungan yang baik, memberikan kesempatan kerja bagi rakyat di pedesaan, serta memberikan penghasilan memadai sehingga mereka mempunyai sumbangan cukup berarti bagi proses pertumbuhan ekonomi.

Sektor pertanian pun masih menjadi tumpuan utama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Sekitar 37,7 juta penduduk pada Agustus 2016 menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, lebih tinggi dibandingkan sektor lain di Indonesia (BPS, 2016). Dengan adanya fakta tersebut, maka wajar jika pemerintah memberikan perhatian kepada sektor pertanian. Anggaran untuk Kementerian Pertanian pada tahun 2017 menyentuh angka 22,1 Triliyun, meski berkurang dari tahun sebelumnya, namun jumlah tersebut masuk ke dalam 10 Kementerian dengan anggaran terbesar (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2016).

Anggaran yang cukup besar tersebut nyatanya belum menjamin kesejahteraan ekonomi petani. Efendi (2015) melaporkan jika rata-rata pendapatan rumah tangga petani di akhir tahun 2014 hanya sebesar 12,41 juta pertahun. Sementara Nilai Tukar Petani (NTP) yang selama ini dijadikan ukuran kesejahteraan petani juga menunjukkan tren menurun pada periode 2012-2015. Pada tahun 2012, NTP sebesar 105,4, tahun 2013 menurun menjadi 104,91, tahun 2014 turun menjadi 102,03, dan 2015 bulan Agustus kembali mengalami penurunan menjadi 101,28 (BPS, 2015b). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya kongkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kesejahteraan petani terutama petani kecil layak diupayakan mengingat petani mempunyai peran utama dalam kemakmuran ekonomi. Kementerian Pertanian periode ini mencanangkan peningkatan produksi dan kualitas pada aspek hulu sampai *onfarm*, melakukan pengolahan nilai tambah, tata niaga, mengendalikan impor, dan mendorong ekspor dari aspek hilir. Pada aspek hulu, diterapkan strategi memberi kemudahan input berupa subsidi pupuk, benih dan berbagai bantuan, membangun infrastruktur irigasi dan lahan, mekanisasi untuk

efisiensi produksi dan mutu hasil, pelatihan, penyuluhan, asuransi usaha tani dan lainnya (Bantolo, 2016). Sementara pada aspek hilir, strategi yang diterapkan pemerintah yakni sistem pengaturan tata niaga dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah atau beras yang diikuti Program Mentan berupa Sergap (Serap Gabah) petani oleh Bulog (Bantolo, 2016).

Jika menilik pada pengalaman empiris, Hermanto dan Swastika (2011) dalam tulisannya berpendapat jika penguatan kelompok tani lah yang menjadi langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat alasan dibentuknya kelompok tani secara sudut pandang ekonomi adalah menghindari biaya transaksi tinggi yang dibebankan kepada para anggotanya (Ramdhani, Nulhaqim, dan Fedryansyah, 2016). Petani akan mendapatkan harga input yang lebih murah jika membeli input secara kolektif dibanding membeli secara individu. Biaya produksi pun dapat ditekan sehingga pendapatan petani dapat meningkat. Selain dalam penyediaan input, kelompok tani juga dapat berperan dalam pemasaran hasil secara kolektif, akses pertukaran informasi, sasaran penerapan teknologi, dan lain sebagainya. Selaras dengan asumsi tersebut, Permentan no. 82 tahun 2013 memaparkan 3 fungsi kelompok tani, (1) Sebagai kelas belajar, (2) Sebagai wahana kerjasama, dan (3) Unit Produksi. Fungsi dan peran yang dijalankan kelompok tani tersebut seharusnya menjadi aset bagi pemerintah untuk menerapkan berbagai program agar berjalan secara kolektif dan berdampak masif.

Namun fakta di lapangan tidak selaras sebagaimana mestinya. Nasrul (2012) memaparkan 3 permasalahan yang kerap melekat pada petani dan kelembagaan petani di Indonesia

1. Minimnya pengetahuan dan wawasan petani terhadap masalah manajemen produksi serta jaringan pemasaran
2. Aktivitas petani masih terfokus pada sisi *onfarm*
3. Fungsi dan peran kelembagaan petani sebagai wadah organisasi belum berjalan optimal

Hermanto dan Swastika (2011) memaparkan penyebabnya, (1) kelompok tani kurang mandiri, (2) Kurangnya Partisipasi petani, (3) Sebagian kelompok tani tidak kompak dan sebagian lagi sudah mengundurkan diri namun masih terdaftar.

Jika menelisik lebih dalam, tentu masih banyak faktor yang menyebabkan kurang optimalnya peran dan fungsi kelompok tani, di antaranya faktor kepemimpinan dan komunikasi dalam kelompok tani. Kepemimpinan menurut Northouse (2013) adalah proses seseorang memengaruhi sekelompok individu untuk menggapai tujuan bersama. Maka dapat dikatakan jika seorang pemimpinlah yang menjadi nahkoda untuk menentukan berjalannya roda organisasi.

Bass (1985) dalam Yukl mengelompokkan model kepemimpinan yang lazim diterapkan dalam suatu organisasi ke dalam 2 kelompok besar, yakni Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional. Kepemimpinan Transaksional yaitu sebuah pertukaran imbalan-imbalan untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga anggota bekerja sesuai timbal balik yang akan mereka terima. Sedangkan dalam Kepemimpinan Transformasional para pemimpin dan pengikut saling meningkatkan moral dan motivasi yang lebih tinggi. Sehingga faktor emosi memegang peran penting dalam model Kepemimpinan Transformasional. Selayaknya lembaga kemasyarakatan, tentu kelompok tani juga mempunyai model kepemimpinan untuk menjalankan roda organisasi.

Pemimpin dalam kelompok tani mempunyai peran yang vital dalam eksistensi kelompok tani. Kehadirannya turut memengaruhi keberhasilan dalam kegiatan yang dicanangkan oleh kelompok tani. Rika dan Sumarjo (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan semakin tinggi dukungan kepemimpinan terhadap kelompok maka semakin tinggi pula intensitas dan partisipasi petani dalam proses pemberdayaan. Rika dan Sumarjo (2014) juga memaparkan sosok pemimpin dalam kelompok tani berperan sebagai pintu masuk program pemberdayaan, penghubung antara kelompok dan pihak luar, dan sebagai penghubung masuknya informasi-informasi penting. Maka dari itu, interaksi dan komunikasi antara pemimpin dan anggota dalam suatu kelompok atau organisasi menjadi vital adanya.

Sama halnya dengan kepemimpinan, komunikasi dalam organisasi juga penting adanya. Goldhaber (1986) dalam Muhammad (2014) menjelaskan bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau dinamis. Komunikasi organisasi dalam suatu kelompok tani dapat memengaruhi interaksi antara pemimpin dan anggota.

Kredibilitas pemimpin ditentukan dari bagaimana dia memberikan instruksi pada anggotanya. Sementara keaktifan anggota dapat dilihat dari bagaimana seorang anggota menyampaikan aspirasinya dalam suatu pertemuan. Hal tersebut merupakan bagian dari komunikasi organisasi.

Kosasih, Sarwoprasodjo, dan Susanto (2014) dalam penelitiannya di seluruh gapoktan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor menyimpulkan “Terdapat hubungan sangat nyata antara komunikasi organisasi dalam pengembangan kinerja pengurus Gapoktan dengan iklim komunikasi, dan terdapat hubungan sangat nyata antara iklim komunikasi dengan kepuasan komunikasi”. Komunikasi organisasi yang baik menciptakan iklim yang menyenangkan juga turut meningkatkan kinerja anggotanya. Hal tersebut juga dibuktikan oleh Putra (2013), dalam penelitiannya di Kabag Humas DPRD Provinsi Kalimantan Timur membuktikan bahwa komunikasi yang dijalin oleh pemimpin berpengaruh sebesar 75,3% terhadap motivasi kerja karyawan. Kedua fakta tersebut mencerminkan jika komunikasi organisasi baik dari atasan ke bawahan (*downward communication*) atau pun dari bawahan ke atasan (*upward communication*) mempunyai pengaruh terhadap kinerja maupun motivasi kerja yang terjadi dalam organisasi.

Kelompok Tani Sumber Urip di desa Watukebo, Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu kelompok tani yang maju di Kabupaten Banyuwangi. Terbukti dengan dijadikannya kelompok ini sebagai prioritas sasaran program pertanian padi organik di Kabupaten Banyuwangi. Kelompok Tani Sumber Urip juga telah mendapat sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LeSOS) sebagai produsen beras organik.

Hal tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Sayidi (Ketua Kelompok Tani Sumber Urip) yang berhasil menginisiasi petani sekitar untuk turut serta menerapkan pertanian organik. Model kepemimpinan yang diterapkan oleh Ketua Kelompok Tani Sumber Urip lebih condong pada model kepemimpinan transformasional yang meningkatkan motivasi dan moralitas pemimpin maupun anggotanya. Ketua Kelompok Tani Sumber Urip mencoba memberi dan menjadi contoh dalam memotivasi anggotanya untuk menerapkan pertanian padi organik. Hal itu juga sekaligus dapat memberikan motivasi bagi dirinya dalam menerapkan komunikasi organisasi dari atasan ke bawahan.

Namun realitanya, instruksi Ketua Kelompok Tani Sumber Urip untuk menerapkan pertanian organik hanya 11 orang dari 39 anggota aktif Kelompok Tani Sumber Urip. Tentu hal tersebut cukup mengherankan mengingat apa yang dicapai oleh Ketua Kelompok Tani Sumber Urip. Maka dari itu, perlu ditelaah lebih lanjut sejauh mana pengaruh model kepemimpinan dan komunikasi organisasi yang diterapkan di Kelompok Tani Sumber Urip memengaruhi partisipasi kelompok tani dalam penerapan pertanian organik padi.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Salah satu program unggulan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 adalah pengembangan pertanian organik komoditas padi (Su'udi, 2017). Pertanian organik dianggap sebagai representasi dari terciptanya daya saing ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan tanpa mengesampingkan kearifan lokal.

Terwujudnya program unggulan berupa pertanian padi organik yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tidak dapat terlepas dari Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini adalah Petani. Kabupaten Banyuwangi mempunyai 2 kelompok tani yang dijadikan sasaran program pertanian padi organik. Salah satu kelompok tani tersebut adalah Kelompok Tani Sumber Urip yang terletak di desa Watukebo, kecamatan Blimbingsari.

Ditunjuknya kelompok tani Sumber Urip sebagai salah satu kelompok tani sasaran tidak terlepas dari peran ketua Kelompok Tani Sumber Urip yakni Bapak Sayidi. Bapak Sayidi berhasil menginspirasi petani sekitar dalam penerapan pertanian organik. Beliau merintis dan mencoba berbagai metode sebelum akhirnya menghasilkan produk yang diharapkan. Keberhasilan tersebut dapat memicu petani sekitar untuk ikut menerapkan metode yang diterapkan oleh Bapak Sayidi. Bapak Sayidi juga menerapkan model kepemimpinan transformasional untuk memotivasi dan meningkatkan moralitas petani.

Model kepemimpinan yang diterapkan dapat berhubungan dengan iklim komunikasi dalam organisasi. Salah satu elemen dalam komunikasi organisasi adalah komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan ke bawahan. Komunikasi yang dijalin oleh pemimpin ke bawahan menurut Putra (2014)

berpengaruh sebesar 75,3% terhadap motivasi kerja. Berdasarkan fakta tersebut, model kepemimpinan yang diterapkan oleh Ketua Kelompok Tani Sumber Urip dapat sejalan dengan iklim komunikasi organisasi jika diterapkan dengan baik.

Namun realitanya, instruksi Ketua Kelompok Tani Sumber Urip untuk menerapkan pertanian organik hanya diikuti oleh 11 dari 39 anggota aktif Kelompok Tani Sumber Urip. Melihat adanya kejanggalan tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh ketua Kelompok Tani Sumber Urip?
2. Apakah kepemimpinan transformasional dan komunikasi organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anggota Kelompok Tani Sumber Urip dalam kegiatan pertanian padi organik?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini menjadi terfokus. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Partisipasi dalam kegiatan pertanian padi organik yang diterapkan oleh Kelompok Tani Sumber Urip meliputi partisipasi dalam bentuk fisik dan pengetahuan. Partisipasi terbatas dalam tahun 2016
2. Penelitian ini membahas partisipasi anggota Kelompok Tani Sumber Urip dalam kegiatan pertanian padi organik meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Kepemimpinan transformasional yang diamati meliputi karakteristik pengaruh ideal, motivasi inspirasi, rangsangan intelektual, dan pertimbangan individu.
4. Komunikasi organisasi yang diamati adalah jaringan komunikasi organisasi yang bersifat formal meliputi komunikasi vertikal (*Upward communication* dan *downward communication*) dan komunikasi horizontal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh ketua Kelompok TTani Sumber Urip.

2. Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dan komunikasi organisasi secara simultan terhadap partisipasi anggota Kelompok Tani Sumber Urip dalam kegiatan pertanian padi organik.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tambahan Informasi bagi Kelompok Tani Sumber Urip khususnya mengenai kepemimpinan transformasional, komunikasi organisasi dan pengaruhnya terhadap partisipasi pada kegiatan pertanian organik padi. Informasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan pertanian organik padi.
2. Sebagai masukan dan informasi bagi pemerintah khususnya Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi agar dapat meningkatkan partisipasi petani dalam kegiatan pertanian organik padi yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang penelitian sejenis.